

**KAPABILITAS BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA PADANG
DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI
KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIS UNP
Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

EKO SAMMARA VALENTINO TURNIP
TM/NIM: 2015/15042114

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kota Padang dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kota
Padang

Nama : Eko Sammara Valentino Turnip

Nim / TM : 15042114 / 2015

Program Studi : Administrasi Publik

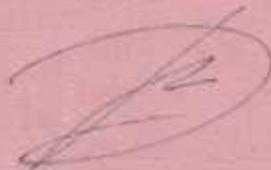
Jurusan : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 06 Agustus 2019

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



Zikri Alhadi, S.I.P., M.A.
NIP. 19840606 200812 1 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

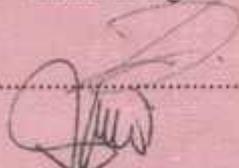
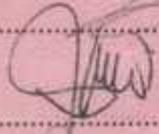
Pada hari Selasa, Tanggal 6 Agustus 2019 Pukul 11.00 s/d 12.00 WIB

Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang

Nama : Eko Sammara Valentino Turnip
NIM : 15042114
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 06 Agustus 2019

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Zikri Alhadi, S.I.P., M.A.	1. 
2. Anggota : Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D.	2. 
3. Anggota : Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si.	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19610218 198403 2 001

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Sammara Valentino Turnip
NIM/TM : 15042114
Tempat / Tanggal Lahir : Payakumbuh / 15 Februari 1995
Program studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul “Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang” adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 06 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan



Eko Sammara Valentino Turnip

15042114/2015

ABSTRAK

EKO SAMMARA VALENTINO TURNIP 15042114/2015 : Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang

Penelitian ini didasari pada tanggung jawab yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam melakukan manajemen bencana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menetapkan BPBD sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas dalam melakukan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kapabilitas organisasi yang dimiliki oleh BPBD Kota Padang dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kota Padang, medeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki BPBD Kota Padang serta menguraikan upaya yang dilakukan BPBD Kota Padang dalam meningkatkan kapabilitasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan lewat wawancara dengan informan, observasi di lapangan dan studi dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di kantor BPBD Kota Padang. Informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Sedangkan untuk uji keabsahan data yang digunakan ialah triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapabilitas BPBD Kota Padang masih belum optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari permasalahan yang ditemui di lapangan seperti fungsi koordinasi yang dilakukan BPBD sangat lemah, kurangnya jumlah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai serta anggaran yang masih sangat minim. Disamping itu terdapat kekuatan yang dimiliki BPBD Kota Padang yaitu aturan yang jelas dan koordinasi yang dilakukan dengan para *stakeholder*. Untuk kelemahan di BPBD Kota Padang ialah sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana yang belum mencukupi serta tingkat mutasi yang tinggi. Lalu terdapat peluang yang dimiliki BPBD Kota Padang yaitu peran aktif organisasi terkait kebencanaan dan aturan yang mendukung anggaran BPBD Kota Padang. Sedangkan ancaman yang dapat mengancam BPBD Kota Padang ialah ego sektoral dari masing-masing organisasi kebencanaan dan masih kurangnya kapasitas dan pemahaman masyarakat terhadap bencana. Adapun upaya yang telah dilakukan BPBD Kota Padang ialah mengadakan kegiatan *Coffee Morning* untuk membangun koordinasi dengan *stakeholder*, menambah jumlah personel dengan menggunakan tenaga kontrak dan tenaga relawan, merancang skala prioritas dalam penggunaan anggaran serta mengajukan permintaan penambahan peralatan kepada pemerintah pusat dan daerah.

Kata Kunci : Analisis SWOT, BPBD, Kapabilitas, Pengurangan Risiko Bencana

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan, dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang”**. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena mengingat segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

3. Ibu Nora Eka Putri, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang sekaligus pembimbing akademik bagi penulis.
4. Bapak Zikri Alhadi S.I.P., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, dan waktu yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Syamsir, M.Si.,Ph.D. selaku dosen penguji I dan Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran, kritik dan masukan selama ujian dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara yang sudah memberikan pengetahuan dan wawasan kepada penulis selama melaksanakan kuliah.
7. Bapak Firdaus, S.T., Bapak Sutan Hendra, S.T.,Bapak Ir. Syaiful Bahri, IbuRita Sumarni, S.Sos, M.M.,Ibu Devi Susanty Razif, S.Sos., BapakRezko Yunanda,Amd., Bapak F. Orlando, Bapak Revance Jefrizal, Ibu Patra Rina Dewi, S.Si.,M.Sc.selaku informan penelitian yang sudah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada orang tua penulis yaitu Bapak Juliman Turnip dan Ibu Rosita Malau yang telah memberikan dukungan moral dan materil serta doa yang tulus dan ikhlas kepada penulis.
9. Adik-adik tercinta, Yuni Febriani dan Maristella yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis

10. Terima kasih yang spesial penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat penulis di The Kontrakan, Agung Fio Marisginta Mtd, Bayu Wijaya Putra, Dicky Zeparianto, Ovael Sandro Melta, M. Ridho Aslami yang telah banyak membantu dan berjuang bersama dalam satu rumah hingga empat tahun ini.
11. Spesial terima kasih kepada Aulia Sundari, Witya Tryanti, Resfiana, Yanni Ramadhani, Nurul Fikra, Zakia Ulfa, Dicki Mulya, Ahmad Zakki, Reza Fajriandi, Syukrizal Mulya, Andrisk Khairi, M. Ilham Wahyudi yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih atas kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang telah kita jalin bersama kepada rekan-rekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2015
13. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kasih dan karunia-Nya yang berlipat ganda kepada semua pihak atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Padang, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teori.....	14
1. Konsep Kapabilitas Organisasi	14
2. Konsep Pengurangan Risiko Bencana	22
3. Konsep Manajemen Bencana.....	27
4. Konsep Analisis SWOT	37
B. Kerangka Konseptual	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43

C. Informan Penelitian.....	43
D. Jenis Data dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Instrumen Penelitian.....	50
H. Teknik Uji Keabsahan Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Temuan Umum.....	53
B. Temuan Khusus.....	62
C. Pembahasan.....	104
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel1.1 Data Final Korban Meninggal dan Kerugian Materi Akibat Gempa 30 September 2009 di Kota Padang	3
Tabel1.2 Tingkat Risiko Bencana di Kota Padang	4
Tabel2.1 Matriks Model Analisis SWOT Kearns	40
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	44
Tabel 4.1 IbukotaKecamatandanJumlahKelurahan Kota Padang.....	54
Tabel 4.2JumlahdanKepadatanPenduduk Kota Padang.....	55
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil BPBD Kota Padang Berdasarkan Jenjang Pendidikan	69
Tabel 4.4Daftar Peralatan yang Dimiliki oleh BPBD Kota Padang Tahun 2019	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1 Empat Dimensi Kapabilitas.....	21
Gambar 2.2 Klasifikasi Bencana.....	30
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual	41
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang	45
Gambar 4.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Padang.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ratusan juta penduduk dan banyak pulau yang tersebar dari ujung barat yaitu Sabang sampai ujung timur yaitu Merauke. Indonesia terletak pada pertemuan lempeng tektonik aktif, jalur pegunungan aktif, dan kawasan beriklim tropik, sehingga menjadikan sebagian wilayahnya rawan terhadap bencana alam.

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab dalam melakukan penanggulangan bencana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Di dalam undang-undang tersebut telah menetapkan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui lembaga pemerintah non-departemen yaitu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) di tingkat pusat dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di tingkat daerah.

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana ialah Kota Padang. Kota Padang merupakan kota terbesar di pantai barat pulau Sumatera sekaligus ibu kota dari provinsi Sumatera Barat. Kota ini memiliki wilayah seluas 694,96 km² dengan kondisi geografi berbatasan dengan lautan dan dikelilingi oleh perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl (meter di atas permukaan laut). Berdasarkan data dari

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 927.168 jiwa.

Pada tingkat provinsi, Kota Padang memiliki potensi bencana yang paling tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di provinsi Sumatera Barat. Kota Padang memiliki potensi bencana yang dapat terjadi seperti gempa bumi, tsunami, kekeringan, banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim, abrasi pantai, kebakaran lahan atau hutan, dan lain sebagainya. Bencana-bencana tersebut memiliki dampak buruk yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.

Sebagai contoh Gempa 30 September 2009 berkekuatan 7,9 Skala Richter dengan kedalaman 71 km sebelah barat daya Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat yang mengakibatkan banyaknya terjadi korban baik dari segi materi maupun korban jiwa. Bencana ini adalah bencana nasional bagi Negara Indonesia karena jumlah korban yang berjatuhan sangat banyak. Daerah-daerah yang terkena dampaknya adalah Kota Padang, Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman Barat dan sebahagian kecil lagi wilayah Kabupaten Agam. Data final mengenai jumlah korban meninggal dan kerugian materi akibat gempa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Data Final Korban Meninggal dan Kerugian Materi Akibat Gempa 30 September 2009 di Kota Padang

Dampak Bencana	Jumlah
Korban Jiwa	
Korban Jiwa Meninggal	1.195 orang
Korban Jiwa Luka Berat	619 orang
Korban Jiwa Luka Ringan	1.179 orang
Kerugian Materi	
Rumah Penduduk Rusak Berat	114.797 rumah
Rumah Penduduk Rusak Sedang	676.198 rumah
Rumah Penduduk Rusak Ringan	67.828 rumah
Kerusakan Sarana Fasilitas Umum	
Ruang Pendidikan	2.163 rumah
Fasilitas Kesehatan	51 unit
Rumah Ibadah	1.001 unit
Jembatan	21 unit
Ruas Jalan	178 unit
Irigasi Rusak Berat	130

Sumber: Alhadi (2014:35)

Banyaknya korban jiwa yang berjatuhan serta kerugian materi yang ditimbulkan oleh gempa bumi di Kota Padang tidak lain karena kurangnya persiapan untuk menghadapi kondisi terburuk dalam menghadapi bencana, terutama bencana gempa, apalagi yang berpotensi tsunami. Rumah-rumah yang dibangun oleh masyarakat di Kota Padang kebanyakan standarisasinya terhadap aman gempa juga tidak terpenuhi. Di sisi lain para pakar dan ahli gempa juga menganalisis bahwa bencana gempa bisa terjadi lagi bahkan dengan magnitude Skala Richter yang besar serta disertai oleh gelombang Tsunami mengingat Sumatera Barat terletak tidak jauh dengan lokasi lempengan bumi di Samudera Pasifik. Oleh sebab itu, Kota Padang dapat dikatakan sebagai kota yang rentan terhadap bencana.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Padang tahun 2014-2018 menghasilkan tingkat risiko untuk potensi bahaya di Kota Padang yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 : Tingkat Risiko Bencana di Kota Padang

No	Jenis Bahaya	Bahaya		Kerentanan		Kapasitas		Risiko	
		Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat
1	Banjir	0,755	Tinggi	0,727	Tinggi	0,445	Sedang	0,670	Tinggi
2	Gempa Bumi	0,537	Sedang	0,806	Tinggi	0,442	Sedang	0,622	Sedang
3	Tsunami	0,729	Tinggi	0,735	Tinggi	0,409	Sedang	0,667	Tinggi
4	Tanah Longsor	0,567	Sedang	0,556	Sedang	0,335	Sedang	0,590	Sedang
5	Kekeringan	0,654	Sedang	0,785	Tinggi	0,470	Sedang	0,647	Sedang
6	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	0,791	Tinggi	0,656	Sedang	0,342	Sedang	0,722	Tinggi
7	Cuaca Ekstrem	0,861	Tinggi	0,774	Tinggi	0,427	Sedang	0,732	Tinggi
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,516	Sedang	0,689	Tinggi	0,414	Sedang	0,582	Sedang
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	0,333	Rendah	0,773	Tinggi	0,302	Rendah	0,564	Sedang
10	Gagal Teknologi	0,662	Sedang	0,664	Sedang	0,302	Sedang	0,742	Sedang

Sumber : Kajian Risiko Bencana BPBD Kota Padang 2014-2018

Dari data tentang potensi risiko bencana yang rawan terjadi di Kota Padang tersebut dapat disimpulkan bahwa bencana di Kota Padang memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi. Maka dari itu perlu dipersiapkan penanganan bencana yang baik apabila sewaktu-waktu bencana tersebut terjadi di

Kota Padang. Tentunya hal tersebut merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Padang dalam menangani bencana yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab saat terjadi bencana alam yaitu pada pasal 8 yang berbunyi:

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai.

Dilihat dari pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut bahwa pemerintah daerah menjamin pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana dilayani dengan standar pelayanan minimum dan melakukan bantuan untuk melindungi masyarakat yang terkena dampak bencana. Selain tanggung jawab terhadap penanggulangan dan mitigasi bencana alam di daerah, pemerintah daerah juga membentuk BPBD yang berkoordinasi dengan BNPB. Dengan adanya BPBD diharapkan bencana alam yang terjadi di daerah menjadi cepat tanggap dan responsif terhadap kemungkinan bencana alam yang terjadi.

Pada prakteknya dalam melakukan manajemen bencana di tingkat daerah, BPBD tentunya tidak bisa bekerja sendiri, oleh karena itu penanggulangan bencana melibatkan berbagai *stakeholder*. Mulai dari masyarakat itu sendiri, organisasi masyarakat, hingga pihak swasta yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. BPBD sebagai badan yang bertugas untuk melakukan penanggulangan bencana berkewajiban untuk mengkoordinasikan semua aktor dalam melakukan manajemen bencana. Hal tersebut menjadikan BPBD sebagai koordinator penanggulangan bencana bagi pihak pemerintah pusat maupun daerah serta pihak swasta yang ikut memberi bantuan. Namun faktanya di lapangan, BPBD Kota Padang masih belum efektif dalam melakukan fungsi koordinasi terhadap seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf dari bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di kantor BPBD Kota Padang yaitu Bapak Rezko Yunanda, Amd. yang mengatakan bahwa:

“...Peranan dan tupoksi masing-masing instansi yang terlibat sudah jelas dan tertera di dalam dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) secara nyata, namun masih terdapat tumpang tindih peran yang dikarenakan ketidakpahaman instansi terkait terhadap tugas mereka masing-masing sehingga terjadi ketidaksesuaian antara peran yang sebenarnya dengan tindakan yang dilakukannya di lapangan. Contohnya seperti ketika banjir yang terjadi pada bulan Maret 2016 di Padang Selatan, PMI, Dinas Sosial, dan BPBD sama-sama menyalurkan air bersih sehingga bantuan air bersih banyak, sedangkan kebutuhan dapur umum belum *ter-cover* seluruhnya oleh Dinas Sosial. Seharusnya Dinas Sosial fokusnya ke dapur umum dan air bersih disalurkan oleh BPBD dan PMI.” (Wawancara 24 September 2018)

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa peran dan tupoksi *stakeholder* yang terlibat dalam penanggulangan bencana sudah jelas, namun masih terdapat tumpang tindih peran dikarenakan ketidakpahaman terhadap tugas

masing-masing instansi. Hal ini sejalan dengan pernyataan oleh Konsultan PRB/Direktur Eksekutif Kogami Kota Padang yaitu Ibu Patra Rina Dewi, S.Si,M.Sc yang mengatakan bahwa:

“...Fungsi BPBD sangat lemah. BPBD hanya menjalankan fungsi untuk mengkoordinasi dan itupun masih luput dan lemah. Sedangkan tugas-tugas yang diemban oleh BPBD tidak semuanya terkerjakan sesuai dengan target. Sepertinya pola pengelolaan kegiatan di pemerintahan hampir sama misalnya perencanaannya yang lama, penganggaran juga lama, tidak terstruktur, dan terkesan mendadak. Mereka punya rapat koordinasi tapi rapat koordinasi itu tidak berbau rapat, jadi hanya pemaparan narasumber dan mereka hanya mendengar. Jadi memang rapat dan ada tanya jawab dan rapat koordinasi itu kan mestinya banyak arah (multi arah), kalau ini misalkan narasumber dari Kepala Pelaksana Provinsi Sumbar, Kalaksa BPBD Kota Padang, Kodim, Polres tapi tidak ada rumusan apa pun. Lebih seperti seminar.” (Wawancara 20 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa masih belum terjalinnya koordinasi yang baik antara BPBD Kota Padang dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Kota Padang. Instansi-instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana pun belum sepenuhnya paham akan tugas dan fungsinya saat melakukan eksekusi di lapangan. Hal ini dikarenakan masih belum maksimalnya fungsi BPBD sebagai *leading sector* dalam mengkoordinasikan semua *stakeholder* yang terlibat dalam kebencanaan. BPBD Kota Padang masih belum maksimal dalam memberikan pedoman dan arahan terkait peranan masing-masing instansi sehingga berimbas pada tidak maksimalnya pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat yang terkena dampak bencana.

Kemudian di BPBD Kota Padang juga terdapat permasalahan dimana kurangnya jumlah sumber daya manusia yang saat ini dimiliki BPBD Kota Padang bila dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya untuk dapat

mengoperasikan instansi disegala lini sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh dengan Bapak Firdaus, S.T. selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kota Padang mengatakan bahwa:

“...Di BPBD Kota Padang sendiri masih kekurangan tenaga personil. Untuk sekarang saja, BPBD kekurangan tenaga personil sebanyak 100 orang lebih, sementara yang kita punya sekarang untuk PNSnya saja sekitar 40 orang. Akibatnya di BPBD Kota Padang masih terdapat jabatan-jabatan kosong yang belum diisi oleh pejabat.” (Wawancara 2 Mei 2018)

Dari hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa kurangnya tenaga personil yang dimiliki BPBD Kota Padang saat ini menyebabkan kurang efektifnya kinerja yang dilakukan oleh BPBD dalam proses penanggulangan bencana. Kekurangan tenaga personil di BPBD Kota Padang juga disebabkan oleh mutasi yang terlalu tinggi. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh salah Bapak Rezko Yunanda, Amd. selaku staf bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di kantor BPBD Kota Padang yang mengatakan bahwa :

“...SDM memang sangat kurang, bencana sudah lama, namun ilmunya masih baru. Orang-orang bekerja disini mungkin dia sudah konsen di ilmu lain, namun masuk kesini. Tentunya harus belajar lagi. Setelah belajar dan paham, kadang mereka gak cocok dengan pekerjaan disini, jadi memutuskan untuk pindah. Orang yang bekerja di BPBD sendiri kebanyakan bukan dari latar belakang kebencanaan, bahkan mereka sendiri tidak paham dengan kebencanaan. Kami disini hanya memiliki 42 karyawan, dan itu tidak semuanya yang professional.” (Wawancara 24 Juni 2019)

Selanjutnya, permasalahan yang ada di BPBD Kota Padang ialah anggaran yang dimiliki saat ini masih sangat minim. Dari anggaran tersebut BPBD harus mampu mengelola dengan baik agar dana tersebut dapat mencukupi biaya pelaksanaan setiap program yang dimiliki oleh BPBD. Permasalahan tersebut juga

disampaikan oleh Bapak Firdaus, S.T. selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kota Padang mengatakan bahwa:

“...Untuk persoalan dana BPBD Kota Padang juga masih mengalami kendala dimana BPBD Kota Padang harus melakukan penggalangan dana awal sebagai pancingan agar dana dari pusat dapat turun ke BPBD Kota Padang, namun tidak secara penuh. Misalnya apabila BPBD mau membangun ulang jembatan yang hancur akibat bencana, maka BPBD harus menggunakan dana yang semampunya dulu dari Pemko Padang untuk membangun jembatan tersebut lalu BPBD dapat memberikan bukti berupa foto, aturan dan RAB yang lengkap kepada pusat yang nantinya akan disurvei ulang oleh pihak pusat sebagai bukti bahwa jembatan tersebut merupakan bentuk dampak dari bencana yang terjadi.” (Wawancara 2 Mei 2018)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa BPBD Kota Padang tidak memiliki dana siap pakai yang mencukupi untuk digunakan dalam menanggulangi dampak yang dihasilkan dari bencana yang telah terjadi. Untuk itu BPBD Kota Padang harus mampu menggunakan dana yang tersedia tersebut dengan seefektif mungkin walaupun sebenarnya dana tersebut masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi segala kebutuhan di BPBD Kota Padang.

Selain itu, BPBD Kota Padang juga masih terkendala mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh

“...Untuk sarana prasarana yang kita miliki saat ini tentu kita masih kurang. Kita di BPBD ini masih membutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang mencukupi baik dari segi jumlah dan kelengkapannya. Apalagi kalau datang bencana besar seperti gempa dan tsunami, jelas kita pasti kewalahan.” (Wawancara 2 Mei 2018)

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa BPBD Kota Padang masih memiliki masalah mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Sarana dan prasarana yang saat ini dimiliki oleh BPBD Kota Padang masih belum mencukupi baik dari segi jumlah maupun kelengkapannya. Oleh karena itu perlu pembenahan

di BPBD Kota Padang untuk dapat memenuhi kekurangan dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menghadapi bencana.

Kapabilitas yang baik dari pemerintah daerah dalam penanganan atau penanggulangan bencana di Kota Padang masih belum optimal. Hal ini disebabkan pemerintah daerah masih belum memberikan perhatian lebih terhadap isu kebencanaan yang sebenarnya merupakan isu terdepan dan belum menjadi bagian dari kebijakan strategis khususnya Pemerintah Kota Padang. Kondisi ini membuat masyarakat tidak berdaya jika menghadapi bencana yang dapat datang secara tiba-tiba. Dengan begitu, kapabilitas organisasi publik yang fokus pada kebencanaan seperti BPBD Kota Padang tentu perlu dikembangkan lagi dan melihat apa yang kurang dari sumber daya yang telah dimiliki saat ini. Kapabilitas organisasi menjadi isu yang penting karena mencakup bagaimana organisasi publik seperti BPBD Kota Padang dapat mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya secara optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang kemampuan BPBD Kota Padang dalam melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana dalam rangka mengurangi dampak buruk yang dapat ditimbulkan saat terjadi bencana. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk judul penelitian yang berjudul **“Kapabilitas BPBD Kota Padang dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPBD Kota Padang
2. Masih banyak terjadi mutasi pegawai di BPBD Kota Padang
3. Kurangnya peningkatan kapasitas atau pelatihan bagi sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPBD Kota Padang
4. Masih sulitnya BPBD Kota Padang dalam melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang saat ini dimiliki oleh BPBD Kota Padang
6. Anggaran yang sangat terbatas yang mengakibatkan terbatas juga program dan kegiatan yang akan dijalankan BPBD Kota Padang

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti terkait dengan kapabilitas BPBD Kota Padang dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kapabilitas BPBD Kota Padang dalam melakukan manajemen bencana untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di Kota Padang ?
2. Apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi BPBD Kota Padang dalam meningkatkan kapabilitasnya dalam pengurangan risiko bencana di Kota Padang?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang dalam meningkatkan kapabilitasnya?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan kapabilitas BPBD Kota Padang dalam pengurangan risiko bencana yang ada di Kota Padang
2. Untuk mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi BPBD Kota Padang dalam meningkatkan kapabilitasnya dalam pengurangan risiko bencana di Kota Padang
3. Untuk menguraikan upaya yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang dalam meningkatkan kapabilitas yang dimiliki.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada maka penulis dapat menjelaskan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep ilmu sosial terutama yang berkaitan dengan mata kuliah Ilmu Administrasi Negara khususnya manajemen bencana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi tingkat kapabilitas yang dimiliki BPBD Kota Padang dalam penerapan manajemen bencana khususnya pada penerapan pengurangan risiko bencana di Kota Padang.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai tingkat kapabilitas yang dimiliki BPBD Kota Padang dalam upayanya melakukan pengurangan risiko bencana yang terjadi di Kota Padang.
- c. Bagi peneliti, selain untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kapabilitas BPBD Kota Padang dalam pengurangan risiko bencana, juga dimaksudkan sebagai pemenuhan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik.